

Paradoks Pembangunan dan Marginalisasi di Papua: Mencari Titik Temu Keadilan Sosial

Pembangunan idealnya merupakan instrumen utama untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk masyarakat di wilayah timur seperti Papua. Namun, realitas yang terjadi di Papua justru memperlihatkan suatu paradoks. Di tengah berbagai proyek pembangunan berskala besar, seperti pembangunan jalan trans-Papua, bandara, dan fasilitas publik lainnya, ketimpangan sosial dan ketidakadilan struktural justru semakin terasa oleh masyarakat adat. Pembangunan yang semestinya membebaskan dan memberdayakan, dalam banyak kasus justru menghadirkan ketidaksetaraan baru dan memperparah proses marginalisasi.

Paradoks ini muncul karena pembangunan yang dijalankan di Papua cenderung berorientasi pada pendekatan teknokratis dari pusat, tanpa memperhatikan kondisi sosiokultural masyarakat lokal. Alhasil, pembangunan tidak hanya gagal menjawab kebutuhan riil masyarakat adat, tetapi juga berpotensi mengikis identitas dan hak-hak mereka atas tanah, budaya, serta ruang hidup. Ketika pembangunan berlangsung tanpa partisipasi aktif dan kesetaraan posisi masyarakat Papua, yang terjadi bukanlah kemajuan inklusif, melainkan penguasaan sepihak atas wilayah dan sumber daya mereka.

Pertanyaan penting yang perlu diajukan adalah: pembangunan di Papua sebenarnya ditujukan untuk siapa? Apakah untuk masyarakat Papua itu sendiri, atau untuk kepentingan ekonomi-politik yang lebih besar di tingkat nasional? Dalam menjawab pertanyaan ini, negara harus merefleksikan kembali arah kebijakannya. Tanpa keberpihakan yang jelas terhadap hak-hak masyarakat adat Papua, pembangunan akan terus menjadi simbol dominasi, bukan sarana pembebasan. Maka dari itu, pembangunan yang sejati harus bertumpu pada prinsip keadilan sosial, pengakuan atas identitas lokal, dan pelibatan aktif masyarakat sebagai subjek pembangunan.

Pembangunan dan Polarisasi Kepentingan

Sejak wilayah Papua resmi menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, pemerintah pusat telah mengintensifkan berbagai proyek pembangunan di wilayah tersebut. Program-program pembangunan ini meliputi pembangunan infrastruktur fisik seperti jalan,

bandara, pelabuhan, serta eksploitasi sumber daya alam yang melibatkan sektor pertambangan, kehutanan, dan perkebunan skala besar. Pemerintah pusat kerap menyatakan bahwa langkah-langkah tersebut merupakan bukti nyata kehadiran negara dan bagian dari upaya pemerataan pembangunan nasional.

Namun demikian, realitas yang dihadapi masyarakat Papua menunjukkan sisi lain dari kebijakan tersebut. Banyak dari proyek pembangunan yang dijalankan tidak memberikan manfaat langsung bagi masyarakat adat Papua, bahkan justru mempercepat proses marginalisasi. Marginalisasi ini terjadi dalam berbagai dimensi, mulai dari ekonomi, sosial, hingga budaya. Masyarakat lokal kerap kehilangan hak atas tanah ulayat mereka karena tergusur oleh proyek-proyek nasional. Selain itu, mereka sering tidak dilibatkan dalam proses perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan, sehingga pembangunan terasa seperti dipaksakan dari luar dan bukan berasal dari aspirasi warga Papua sendiri.

Sudira dkk. (2022), dalam Forum Akademisi untuk Papua Damai, mengkritisi pendekatan pembangunan yang diterapkan di Papua karena terlalu mengutamakan logika ekonomi dan bersifat top-down. Pembangunan yang mengabaikan konteks lokal, menurut mereka, bukan hanya tidak efektif, tetapi juga dapat menimbulkan resistensi dan memperparah ketegangan sosial. Mereka menegaskan bahwa ketika proyek pembangunan dilaksanakan tanpa memperhatikan struktur sosial, nilai-nilai budaya, dan hak masyarakat adat, maka pembangunan tersebut cenderung dipandang sebagai bentuk dominasi kekuasaan pusat. Akibatnya, muncul persepsi bahwa pembangunan adalah instrumen perampasan tanah, sumber daya alam, serta penghapusan identitas kolektif masyarakat Papua.

Oleh karena itu, pembangunan di Papua tidak dapat dilepaskan dari dinamika kekuasaan dan konflik kepentingan. Untuk menciptakan pembangunan yang benar-benar berpihak pada rakyat Papua, pendekatannya harus kontekstual, partisipatif, dan menjunjung tinggi prinsip keadilan sosial. Tanpa hal itu, pembangunan hanya akan menjadi alat polarisasi, bukan solusi bagi kemajuan dan perdamaian Papua.

Marginalisasi dan Ketidakadilan Struktural

Marginalisasi yang dialami masyarakat Papua tidak terjadi dalam ruang hampa. Ia merupakan hasil dari proses panjang ketimpangan historis dan struktural. Dalam artikelnya, Djunatan (2014) menjelaskan bahwa identitas orang Papua kerap kali dipinggirkan dalam narasi besar nasionalisme Indonesia. Masyarakat Papua diposisikan sebagai "yang lain", bukan sebagai subjek yang setara dalam relasi kebangsaan. Akibatnya, berbagai kebijakan pembangunan tidak mampu menyentuh akar-akar ketidakadilan yang bersifat sistemik.

Di sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, masyarakat Papua terus mengalami kesenjangan yang signifikan dibandingkan daerah lain. Pendapatan per kapita rendah, angka kemiskinan tinggi, dan akses terhadap layanan publik masih sangat terbatas di wilayah-wilayah pedalaman Papua. Pembangunan jalan, jembatan, atau bandara memang tampak nyata, tetapi belum diiringi dengan pemberdayaan manusia Papua sebagai pelaku pembangunan.

Pigai (2014), dalam tulisannya mengenai solusi damai di tanah Papua, menegaskan bahwa pembangunan yang mengabaikan luka sejarah, kekerasan negara, dan pelanggaran HAM hanya akan memperdalam krisis kepercayaan antara masyarakat Papua dan pemerintah pusat. Ia menyerukan pentingnya pendekatan yang lebih manusiawi dan dialogis dalam merancang masa depan Papua.

Moratorium Hutan: Perlindungan atau Ancaman Baru?

Kebijakan moratorium hutan yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia pada awalnya merupakan langkah strategis untuk menghentikan laju deforestasi dan kerusakan lingkungan yang semakin meluas. Secara formal, moratorium ini bertujuan untuk menunda pemberian izin baru dalam pemanfaatan kawasan hutan dan lahan gambut, terutama dalam rangka konservasi sumber daya alam dan pengendalian perubahan iklim. Namun, ketika kebijakan ini diterapkan di

Papua—wilayah dengan kawasan hutan terluas dan kekayaan biodiversitas yang sangat tinggi—implikasinya menjadi jauh lebih kompleks dari sekadar perlindungan ekologis.

Yudhanegara (2021) dalam kajiannya mengungkapkan bahwa kebijakan moratorium hutan di Papua tidak serta-merta memberikan perlindungan terhadap masyarakat adat dan hutan adat yang menjadi sumber penghidupan mereka. Justru dalam banyak kasus, kebijakan ini menjadi tumpang tindih dengan kepentingan ekonomi-politik korporasi besar dan elite lokal. Meski izin baru dihentikan secara formal, konsesi lama dan akses informal terhadap lahan tetap berjalan, yang akhirnya berdampak pada hilangnya akses masyarakat adat terhadap tanah ulayat mereka. Alih-alih memperkuat perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat, moratorium hutan sering kali digunakan sebagai instrumen untuk menata ulang tata kelola sumber daya, tanpa keterlibatan langsung komunitas lokal.

Hutan-hutan Papua pun semakin menjadi objek eksploitasi yang dibungkus dengan narasi pembangunan nasional. Perkebunan skala besar, konsesi tambang, dan proyek infrastruktur masuk ke wilayah hutan dengan dalih modernisasi dan pertumbuhan ekonomi. Padahal, masyarakat adat Papua secara turun-temurun menggantungkan hidupnya pada ekosistem hutan, tidak hanya secara ekonomi tetapi juga secara spiritual dan budaya. Ketika akses mereka terampas, maka hilang pula keberlanjutan kehidupan dan identitas kolektif mereka.

Dalam konteks ini, kebijakan moratorium hutan harus dikritisi bukan hanya dari perspektif lingkungan, tetapi juga dari dimensi sosial, politik, dan hak asasi manusia. Pertanyaan mendasarnya adalah: apakah kebijakan ini benar-benar bertujuan melindungi hutan dan masyarakat adat, atau hanya menjadi kedok teknokratis untuk melanggengkan kendali negara dan korporasi atas ruang hidup orang Papua?

Tantangan Integrasi dan Tuntutan Keadilan Sosial

Papua merupakan wilayah yang hingga hari ini terus berada dalam ketegangan antara kepentingan integrasi nasional dan aspirasi masyarakat lokal. Di balik berbagai upaya pembangunan infrastruktur dan program-program pemerintah pusat, banyak orang Papua masih merasakan keterpinggiran dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Mereka merasa tidak sepenuhnya diakui sebagai warga negara yang setara. Perasaan sebagai warga kelas dua muncul akibat akumulasi ketidakadilan historis, marginalisasi sosial, dan kekerasan struktural yang berlangsung selama beberapa dekade. Dalam konteks ini, wacana separatisme dan keinginan

untuk menentukan nasib sendiri bukan sekadar isu politik, melainkan ekspresi dari kekecewaan mendalam terhadap ketidakhadiran keadilan.

Penting untuk dipahami bahwa pembangunan di Papua tidak dapat dilihat semata-mata sebagai proyek teknokratis yang menitikberatkan pada pertumbuhan ekonomi dan infrastruktur fisik. Pembangunan yang tidak berbasis pada prinsip keadilan sosial hanya akan memperlebar jurang antara negara dan masyarakat Papua. Ketika masyarakat tidak dilibatkan secara aktif dan setara dalam proses pembangunan, maka yang terjadi bukan integrasi, melainkan alienasi. Pembangunan yang bersifat sentralistik dan tidak sensitif terhadap nilai-nilai lokal justru memperkuat ketidakpercayaan dan resistensi terhadap pemerintah pusat.

Untuk menghindari hal tersebut, keadilan sosial harus menjadi fondasi utama dalam merancang dan mengimplementasikan kebijakan pembangunan di Papua. Keadilan dalam hal ini tidak hanya merujuk pada distribusi sumber daya secara merata, tetapi juga menyangkut pengakuan atas eksistensi budaya, hak-hak masyarakat adat, serta peran aktif mereka dalam pengambilan keputusan. Pemerintah pusat harus membangun kemitraan sejajar dengan aktor-aktor lokal, baik tokoh adat, tokoh agama, maupun organisasi masyarakat sipil di Papua.

Tanpa pendekatan yang inklusif dan berbasis pada penghormatan terhadap martabat orang Papua, pembangunan akan terus dianggap sebagai simbol kekuasaan eksternal yang tidak berpihak. Papua tidak membutuhkan sekadar pembangunan fisik, tetapi rekonsiliasi, penghormatan, dan pengakuan. Itulah jalan menuju Papua yang damai, adil, dan sungguh-sungguh menjadi bagian utuh dari bangsa Indonesia.

Membangun Papua dari Dalam: Pendekatan Kultural dan Partisipatif

Mencari titik temu keadilan sosial di Papua memerlukan pendekatan baru yang lebih partisipatif, inklusif, dan berbasis pada kebudayaan lokal. Pembangunan tidak bisa lagi hanya dilihat sebagai proyek teknokratis, melainkan sebagai proses sosial yang melibatkan dialog antar-identitas dan antar-kepentingan. Penguatan kapasitas masyarakat adat, perlindungan hak atas tanah ulayat, pendidikan kontekstual, serta rekonsiliasi historis harus menjadi prioritas utama.

Menurut Sudira dkk. (2022), pembangunan yang efektif di Papua hanya dapat terjadi apabila masyarakat lokal memiliki posisi sebagai subjek, bukan objek. Mereka harus dilibatkan sejak tahap perencanaan hingga evaluasi. Kearifan lokal Papua memiliki potensi besar untuk menjadi dasar pembangunan yang berkelanjutan dan bermartabat.

Paradoks pembangunan dan marginalisasi di Papua menunjukkan bahwa pembangunan tidak selalu berarti kemajuan bagi semua orang. Di tengah infrastruktur yang megah, suara masyarakat Papua masih sering terpinggirkan. Jika pembangunan tidak berpihak pada keadilan sosial, maka ia hanya akan memperdalam jurang ketimpangan dan memperkuat disintegrasi sosial. Diperlukan kebijakan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada pemulihan relasi sosial-politik dan pengakuan atas identitas orang Papua. Hanya dengan pendekatan yang inklusif, dialogis, dan berbasis keadilan, pembangunan di Papua dapat menjadi jalan menuju rekonsiliasi dan kedamaian sejati. Maka, pertanyaannya bukan lagi sejauh mana Papua dibangun, tetapi sejauh mana Papua didengarkan dan dihargai sebagai bagian utuh dari Indonesia.

Daftar Pustaka

Yudhanegara, R. A. (2021). Forest Moratorium Policy, Deforestation and Forest Degradation in Papua Province. *Jurnal Planoeearth*, 6(1), 7–22.

Djunatan, S. (2014). Membawa keadilan bagi identitas-diri orang Papua. *Jurnal Administrasi Publik*, 11(2), 1–10.

Pigai, N. (2014). Solusi damai di tanah Papua (Mengubur tragedi HAM dan mencari jalan kedamaian). *Jurnal Administrasi Publik*, 11(2), 1–16.

Sudira, I. N., Pamungkas, C., Aidulsyah, F., Rumkabu, E., & Langowuyo, Y. (2022). Pembangunan, marginalisasi, dan disintegrasi Papua. *Forum Akademisi untuk Papua Damai; Imparsial*; Tifa Foundation.